

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERIODE 2012-2016)

YUDI HARTONO

Program Studi Akutansi Universitas PGRI Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian menggunakan data sekunder mengenai penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Data Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi lima Kabupaten Kota yaitu Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman dan Yogyakarta, yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Yogyakarta. Metode analisa yang digunakan adalah analisa runtut waktu dengan menggunakan bantuan komputer yaitu SPSS, berupa statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi berganda. Hasil uji regresi secara parsial (uji T) menunjukkan nilai sig variabel Pajak Daerah sebesar 0,000. Hasil sig variabel Retribusi Daerah sebesar 0,007. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai sig dari masing-masing variabel < 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil uji regresi secara simultan (uji F) menunjukkan nilai sig $0,000 < 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

The objective of this research is to know the influence of regional tax revenue and regional retribution to the increase of Local Original Income. The study used secondary data on regional tax revenues, regional retribution and Local Original Income obtained from the Financial Statistics of Yogyakarta Special Region covering five Regency Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman and Yogyakarta, published by BPS of Yogyakarta Province. The analytical method used is time coherent analysis using computer assistance that is SPSS, in the form of descriptive statistic, test of classical assumption, and multiple regression test. The result of partial regression test (T test) shows the sig value of Regional Tax variable of 0.000. The result of sig variable regional retribution of 0,007. The result of the analysis shows that the sig value of each variable is < 5%, so it can be concluded that the Regional Tax and Local Retribution partially affect the Local Original Income (PAD). The result of simultaneous regression test (F test) shows sig value $0,000 < 5\%$, so it can be concluded that Local Tax and Local Retribution simultaneously have an effect on Local Original Income (PAD).

Keywords: Local Tax, Regional Retribution, and Local Original Income (PAD)

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah gerakan pembangunan yang sejak lama dicanangkan oleh bangsa Indonesia, kegiatan pembangunan nasional berlangsung secara terus-menerus, bersifat memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah dituntut harus dapat meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi sesuai harapan bangsa Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menjadikan daerah mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu mampu

mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah diantaranya adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), beberapa pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditingkatkan antara lain pajak daerah dan retribusi daerah. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak di berlakukannya otonomi daerah di Indonesia sejak mulai tanggal 1 Januari 2001. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat akan berdampak pada dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kas keuangan daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi daerah dengan melakukan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari Pusat. Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan dari daerahnya.

Pengertian dari pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (M. Pahala Siahaan, 2010:7). Hal ini menunjukkan bahwa pajak

adalah suatu pembayaran wajib dan bersifat memaksa yang dikenakan berdasarkan undang-undang, dan tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban.

Sedangkan pengertian dari retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan (M. Pahala Siahaan, 2010:4). Retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya PAD. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi dengan demikian, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah.

Undang-Undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat pentingnya pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerahnya sendiri.

Jurnal penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Md Krisna Artha A. K. (2013) penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekabupaten/kota di Provinsi Bali. Menurut Adi Nugroho (2012) penambahan pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2012. Menurut R. Budi Hendaris (2008) penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekabupaten/kota di Provinsi

Jawa Barat. Menurut Beta Asteria 2015 penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2008-2012. Hal ini menjadi acuan untuk melakukan penelitian pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan data yang diambil dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah: Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Erly Suandy (2011:10), “Pajak adalah iuran rakyat dan prestasinya kepada pemerintah yang terutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan, norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan guna pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Menurut Erly Suandy (2011:236), pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Erly Suandy (2011: 242), retribusi adalah pemungutan daerah yang dilakukan oleh negara sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, hal ini sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Retribusi dipungut oleh pemerintah Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No.33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah: pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No .33 Tahun 2004, PAD dapat bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak. Penerimaan dari sektor pajak ini antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air bawah tanah dan pajak air permukaan.
- b. Retribusi Daerah
Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan Pemerintah Daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil Perusahaan milik daerah dan pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, Perusahaan Daerah, deviden BPR-BKK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam pengumpulan data penulis mendapatkannya dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah data Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2016, yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi. Penelitian dilakukan selama kurang lebih tiga (3) bulan.

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel bebas (independen) adalah variabel yang menjadi sebab terpengaruhnya variabel dependen.
 - a. Pajak daerah (X_1)
 - b. Retribusi daerah (X_2)
2. Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen yang sifatnya bebas, dalam penelitian ini variabel bebas adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

C. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. *Time Series Analysis* (Analisa Runtut Waktu)

Teknik pengumpulan data dengan melihat pengukuran dari waktu ke waktu tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data selama lima tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mulai bulan Januari sampai bulan Desember

meliputi data: pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Teknik pengumpulan data:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di BPS. Data yang diperoleh merupakan data sekunder, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pencarian dan pengumpulan data dengan mengambil data pada buku Statistik keuangan daerah yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi DIY dan penelitian mengenai pajak daerah retribusi daerah dan PAD.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teoritis yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis data yang diperoleh dalam penelitian lapangan, sehingga menghasilkan kesimpulan serta untuk memecahkan masalah yang ada.

c. Interview

Proses memperoleh keterangan berupa tanya jawab langsung dengan karyawan BPS mengenai informasi data pajak daerah, retribusi daerah dan PAD.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasinya (Riduwan, 2011), dari analisis deskriptif inilah dapat diketahui daerah di DIY yang paling rendah dan paling tinggi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan PAD.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji *normalitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi

dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai means sama dengan nol (Ghozali, 2011:27). Untuk uji normalitas data, penulis menggunakan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Apabila signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Sedangkan jika hasil *kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2011).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model (Ghozali, 2011). Selain itu deteksi terhadap multikolinearitas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Deteksi multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat jika nilai *Variance Inflation Tolerance* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. $VIF=1/Tolerance$, jika $VIF=10$ maka $Tolerance=1/10 = 0,1$.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin-Watson*. Bila angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi Autokorelasi. Menurut Ghozali (2006) uji Autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat autokorelasi antara eror yang terjadi antar periode yang diujikan dalam model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya Autokorelasi harus melihat nilai DW.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain. Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksinya dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen ZPRED dengan residualnya SRESID tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. (Ghozali, 2011:139-143).

3. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linear Berganda

Dalam analisis linear berganda ada dua atau lebih variabel bebas (Independen) dan ada satu variabel terikat (dependen). Analisis regresi dianggap tepat dalam penelitian ini karena analisis regresi tidak hanya menentukan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, akan tetapi juga menentukan arah dari pengaruh tersebut. Model yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Pendapatan
- α = Bilangan konstanta
- $\beta_1 \dots \beta_n$ = Koefisien regresi
- X1 = Pajak daerah
- X2 = Retribusi daerah
- e = error

b. Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen (Ghozali, 2011).

c. Uji F (Fisher)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independennya yang dimaksudkan dalam model regresi secara simultan terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Kriteria pengujian uji F adalah,

apabila nilai signifikan F hitung lebih rendah dari 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang diteliti secara simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011).

d. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan α (alpha=0,05) maka hipotesis diterima, dan hipotesis tidak diterima jika signifikansi t atau probabilitas nilai lebih besar dari tingkat signifikansi α (alpha=0,05) (Ghozali, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Data

a. Pajak Daerah

Selama kurun waktu 5 tahun dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah terbesar, yaitu Rp. 373.137.768.000 yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2015. Sedangkan penerimaan pajak daerah terkecil yaitu Rp. 8.448.290.000 yang diperoleh Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012. Rata-rata penerimaan pajak daerah selama lima tahun sebesar Rp.14.046.419.360 dengan standar deviasi Rp.128.619.601.898.

b. Retribusi Daerah

Selama kurun waktu 5 tahun dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi daerah terbesar, yaitu Rp. 56.898.390.000 yang diperoleh Yogyakarta pada tahun 2014. Sedangkan penerimaan retribusi daerah terkecil sebesar Rp. 6.777.315.000 yang diperoleh Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2014. Rata-rata penerimaan retribusi daerah selama lima tahun sebesar Rp. 28.792.582.040 dengan standar deviasi Rp.13.476.829.358.

c. Pendapatan Asli Daerah

Selama kurun waktu 5 tahun dapat diketahui bahwa penerimaan PAD terbesar yaitu Rp. 643.130.080.000 yang dihasilkan oleh Kabupaten Sleman pada tahun 2015. Sedangkan penerimaan PAD terkecil, yaitu Rp 66.710.859.000 yang dihasilkan oleh Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013. Rata-rata penerimaan PAD selama lima tahun sebesar Rp.

306.362.662.520 dengan standar deviasi sebesar Rp. 181.649.462.741.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berdasarkan keterangan grafik plot, titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas grafik dapat menyesatkan jika tidak berhati-hati menafsirkan. Mungkin terlihat digambar grafik plot terdistribusi normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh karena itu untuk mendukung dan membuktikan hasil uji normalitas grafik perlu dilakukan uji normalitas rumus *Kolmogorov Smirnov*. (Ghozali, 2011)

b. Uji Multikolinieritas

Diketahui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kedua variabel kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada model regresi.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin-Watson*. Bila angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi Autokorelasi. Menurut Ghozali (2006) uji Autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat autokorelasi antara eror yang terjadi antar periode yang diujikan dalam model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya Autokorelasi harus melihat nilai DW. Nilai DW sebesar 1,774. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah Autokorelasi

d. Uji Heteroskedatisitas

Titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah Heteroskedatisitas pada model regresi.

Hasil Regresi Berganda

Tabel Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	koefisien b	Sig	Ket
(Constant)	7,922	0,000	
Pajak Daerah	0.425	0.000	Sig.
Retribusi Daerah	0.319	0.007	Sig.
F hitung	213.052	0,000	Sig.
Adjusted R Square	0.946		

Sumber: Output SPSS diolah 2017

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 7,922 + 0,425X_1 + 0,319X_2 + e$$

Variabel pajak daerah (X_1) memiliki koefisien regresi linear berganda positif sebesar 0,425. Hasil ini berarti bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Jika pajak daerah bertambah Rp.1000 maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp. 425.

Variabel retribusi daerah (X_2) memiliki koefisien regresi linear berganda positif sebesar 0,319. Hasil ini berarti bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Jika retribusi daerah bertambah Rp.1000 maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp. 319.

Hasil Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi

Diperoleh nilai *adjusted R square* (R^2) sebesar 0,946 atau 94,6%. hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu PAD dapat di jelaskan oleh variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 94,6%, sedangkan sisanya 6,4% (100%-94,2%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian

Uji F

Nilai F sebesar 213,052 dengan tingkat sig 0,000. Karena nilai probabilitas (0,000) dibawah tingkat signifikasi alpha yaitu 0,05 sehingga pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Uji t

Pengujian hipotesis pertama yaitu pengaruh pajak daerah terhadap PAD. Berdasarkan tabel 12 diperoleh t-hitung untuk variabel pajak (X_1) sebesar 8,209 dengan signifikasi sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa signifikasi lebih kecil dari alpha 0,05. Hipotesis didukung oleh bukti empiris sehingga hipotesis pertama diterima.

Pengujian hipotesis kedua yaitu pengaruh retribusi daerah terhadap PAD. Berdasarkan tabel 12 diperoleh t-hitung untuk variabel retribusi (X_2) sebesar 2,961 dengan signifikasi sebesar 0,007. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa signifikasi lebih kecil dari alpha 0,05. Hipotesis didukung oleh

bukti empiris sehingga hipotesis kedua diterima.

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta, dibuktikan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,425 dan signifikasi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta diterima.
2. Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta, dibuktikan dengan nilai koefisien regresi variabel retribusi daerah yang bernilai positif sebesar 0,319 dan signifikasi $0,007 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa penerimaan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta diterima.
3. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta, dibuktikan dengan nilai F-hitung sebesar 213,052 dan signifikasi 0,000. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta diterima.

B. Implikasi

Implikasi dalam penelitian dibagi menjadi dua antara lain :

1. Implikasi teoritis

Implikasi teoritis ini berhubungan dengan kontribusi terhadap teori-teori mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Hasil dari penelitian yang mengatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat membuktikan secara empiris teori yang sudah ada mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Implikasi praktis
Hasil penelitian ini memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Yogyakarta untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat sesuai dengan target Pemerintah Daerah tentunya dapat menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

C. Saran

1. Penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk itu sebaiknya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta lebih agresif lagi mempertegas aturan tertib pajak dan amnesti pajak, untuk meningkatkan penerimaan pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini dilakukan guna meningkatkan PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dari itu pemerintah harus memperhatikan dan mengupayakan lagi penerimaan retribusi daerah, agar semakin tinggi penerimaan retribusi daerah dapat meningkatkan PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Peningkatan PAD diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduknya khususnya kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, PAD yang nantinya disalurkan Pemerintah setempat dioptimalkan untuk keperluan daerah, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
4. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa

Yogyakarta, penelitian selanjutnya dapat menggunakan ruang lingkup penelitian yang lebih luas atau penelitian pada Kabupaten dan Kota lain. Penelitian juga dapat menambah periode tahun, tidak hanya dilakukan dengan periode lima tahunan.

5. Penelitian ini hanya terbatas pada pajak daerah dan retribusi daerah, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain sehingga dapat lebih bervariasi dan menambah ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho. 2012 *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012*. Jurnal Skripsi. (Online) (http://eprints.dinus.ac.id/8833/1/jurnal_13626.pdf, diunduh pada 27 Juli 2017)
- Beta Asteria. 2015. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah*. Jurnal Riset Manajemen Vol. 2, No. 1, Januari 2015, 51-61 (Online) (<http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jrm/article/download/14/13>, diunduh pada 27 Juli 2017)
- Data Statistik Keuangan Daerah DIY Tahun 2012-2013. BPS Provinsi DIY
- Data Statistik Keuangan Daerah DIY Tahun 2013-2014. BPS Provinsi DIY
- Data Statistik Keuangan Daerah DIY Tahun 2014-2015. BPS Provinsi DIY
- Data Statistik Keuangan Daerah DIY Tahun 2015-2016. BPS Provinsi DIY
- Indonesia tax Review. "Mengintip Amandemen UU Pajak". Volume VIII/ Edisi 05. 2007
- Marihot. Siahaan P. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Edisi revisi-cet. 2. Jakarta. PT Grafindo Persada.
- Md. Krisna Artha Anggar Kusuma. 2013 *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD sekabupaten/ Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Univesitas Udayana 5.3 (2013):574-585 (Online) (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article>, diunduh pada 27 Juli 2017)
- Suandy, Erly. (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi. Salemba Empat.

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2000 Tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- R. Budi Hendaris. 2008. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Skirpsi (Online) (<http://repository.fe.unjani.ac.id/pdf>, diunduh pada 27 Juli 2017)
- Riduwan, M.B.A. 2011. *Cara Mudah Belajar SPSS dan Aplikasi Statistik Penelitian*. Jakarta: Alfabeta.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat, 2003.